

Identitas Sosial dan Kontak Antar Kelompok dalam Meredam Konflik Verbal atas Tradisi Tahlilan: Studi Kasus di Kelurahan Kangeran Barat, Kabupaten Pamekasan

Feti Eka Leliana *Abstract*

Universitas Islam
Negeri Madura
feti.ekaleliana16@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) licence (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

Differences in religious practices, such as the tahlilan tradition, often trigger social tensions within a diverse society. This study stems from the case of a Muhammadiyah family in Kangeran Barat Village, Pamekasan Regency, who did not perform the tahlilan ritual whilst in mourning and subsequently became the target of criticism by some NU residents. This study employs a qualitative method using a case study approach, and utilises Social Identity Theory and the Contact Hypothesis to analyse the dynamics of the conflict and its potential resolution. The findings indicate that the verbal conflict that occurred was triggered by the reinforcement of group identity and the absence of spaces for interfaith communication. However, all three informants in this study—from both NU and Muhammadiyah—expressed support for solutions involving interfaith dialogue forums among religious leaders and community engagement in cross-group social activities. These findings underscore the importance of public figures' roles and equal interaction in fostering practical religious moderation.

Keywords: *Tahlilan, Verbal Conflict, Social Identity, Religious Moderation.*

Abstrak

Perbedaan praktik keagamaan seperti tradisi tahlilan seringkali menjadi pemicu ketegangan sosial dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini berangkat dari kasus keluarga Muhammadiyah di Kelurahan Kangenan Barat, Kabupaten Pamekasan, yang tidak melaksanakan tahlilan saat berduka dan kemudian menjadi sasaran sindiran oleh sebagian warga NU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta memanfaatkan teori Social Identity dan Contact Hypothesis untuk menganalisis dinamika konflik dan potensi resolusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik verbal yang terjadi dipicu oleh penguatan identitas kelompok dan tidak adanya ruang komunikasi lintas keyakinan. Namun, ketiga informan dalam penelitian ini baik dari NU maupun Muhammadiyah, menunjukkan dukungan terhadap solusi berupa forum dialog antar tokoh agama serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial lintas kelompok. Temuan ini menegaskan pentingnya peran publik figur dan interaksi setara dalam membangun moderasi beragama secara aplikatif.

Kata Kunci: *Tahlilan, Konflik Verbal, Identitas Sosial, Moderasi Beragama.*

PENDAHULUAN

Fenomena perbedaan praktik keagamaan dalam masyarakat Islam Indonesia merupakan kenyataan sosial yang terus hidup dan berkelindan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk paling nyata dari fenomena ini adalah tradisi tahlilan, yang bagi warga Nahdlatul Ulama (NU) dianggap sebagai bagian dari warisan keagamaan dan budaya, namun oleh sebagian warga Muhammadiyah dipandang tidak menemukan dalil syar’i yang eksplisit dalam praktik Rasulullah SAW. Muhammadiyah memiliki interpretasi yang berbeda mengenai landasan syariat tahlilan, di mana mereka menekankan pentingnya berpegang pada dalil-dalil yang shahih dan praktik yang terbukti dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. secara langsung. Kondisi ini menuntut adanya penguatan nilai-nilai moderasi beragama agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Azra, moderasi beragama penting untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah munculnya eksklusivisme keagamaan dalam masyarakat majemuk.¹

Salah satu kasus konkret yang menunjukkan bentuk konflik sosial karena perbedaan tradisi keagamaan terjadi di Kelurahan Kangenan Barat, Kabupaten Pamekasan. Sebuah keluarga Muhammadiyah tidak melaksanakan tahlilan saat orang tuanya meninggal dunia. Keputusan tersebut memicu sindiran dan ucapan bernada merendahkan dari beberapa warga NU, salah satunya berasal dari tetangga depan rumah dan pemilik lahan pemakaman. Meskipun tidak terjadi kekerasan fisik, konflik verbal ini menimbulkan luka sosial dan memperlebar jarak komunikasi antar kelompok warga

¹ Ahmad Kusjairi Suhail, dkk., “Azyurmardi Azra dan Moderasi Beragama di Indonesia,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (18 Maret 2025): 737, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4179>.

yang berbeda pandangan keagamaan. Padahal keluarga tersebut tetap menjaga hubungan sosial dengan menghadiri berbagai acara keagamaan NU lainnya sebagai bentuk toleransi. Fenomena seperti ini sejalan dengan temuan Tajuddin, bahwa perbedaan praktik keagamaan dalam masyarakat sering menimbulkan ketegangan sosial meskipun tidak selalu diekspresikan secara terbuka.²

Melihat dinamika tersebut, penulis menawarkan pendekatan solusi berbasis teori sosial dan psikologi lintas kelompok, yakni *Social Identity Theory* dari Henri Tajfel dan *Contact Hypothesis* dari Gordon Allport. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa kecenderungan untuk mengelompokkan diri dalam “*ingroup*” dan mempersepsi kelompok lain sebagai “*outgroup*” dapat menjadi akar munculnya diskriminasi simbolik, seperti sindiran verbal yang terjadi dalam kasus ini. Tajfel menegaskan bahwa identitas sosial terbentuk melalui proses kategorisasi sosial, identifikasi sosial, dan perbandingan sosial yang pada akhirnya dapat memicu bias terhadap kelompok lain. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, teori ini sangat relevan untuk memahami akar konflik antar kelompok keagamaan yang sering kali bersumber dari penguatan identitas kelompok yang eksklusif.³

Sementara itu, *Contact Hypothesis* berargumen bahwa interaksi langsung antar kelompok berbeda dengan syarat kesetaraan status, kerja sama, dan dukungan sosial dapat mengurangi prasangka serta meningkatkan empati. Pettigrew dan Tropp dalam meta-analisis mereka terhadap lebih dari 500 penelitian membuktikan bahwa kontak antar kelompok secara signifikan mengurangi prasangka, terutama ketika kontak tersebut memenuhi kondisi-kondisi optimal yang dirumuskan Allport.⁴ Jika diterapkan dalam konteks lokal, pendekatan ini dapat menjadi cara untuk membangun ruang dialog yang sehat antar warga NU dan Muhammadiyah, sehingga perbedaan praktik ibadah tidak lagi dipandang sebagai ancaman identitas.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas relasi sosial antara NU dan Muhammadiyah, serta peran tradisi tahlilan dalam masyarakat, seperti penelitian oleh Usisa Rohmah, Mohammad Jailani, Ana Riskasari, Budiman dan Fil Isnaeni, dan Muhammad Diak Udin. Rohmah dalam penelitiannya di Desa Punduhsari menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan praktik keagamaan antara warga NU dan Muhammadiyah, interaksi sosial keduanya tetap berjalan harmonis melalui kesepakatan

² Yuliyatun Tajuddin, “SUMBER DAYA MANUSIA DAN KONFLIK SOSIAL DALAM ORGANISASI KEAGAMAAN (Analisis Fenomena Konflik Komunitas NU dan Muhammadiyah),” *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (Juni, 2016): 75–100, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tadbir/article/view/2384>.

³ Henri Tajfel, “Social Identity and Intergroup Behaviour,” *Social Science Information* 13, no. 2 (April, 1974): 71, <https://doi.org/10.1177/053901847401300204>.

⁴ Thomas F. Pettigrew dan Linda R. Tropp, “A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory,” *Journal of Personality and Social Psychology* 90, no. 5 (2006): 752, <https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751>.

tidak tertulis untuk saling menghormati.⁵ Jailani mengkaji tahlilan sebagai identitas kultural yang memperkuat solidaritas sosial di Madura, di mana tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai ritual keagamaan tetapi juga sebagai mekanisme kohesi sosial.⁶

Riskasari meneliti pengaruh persepsi masyarakat Muhammadiyah terhadap tahlilan dan dampaknya pada relasi sosial di Kulon Progo, menemukan bahwa perbedaan persepsi tidak serta-merta merusak harmoni sosial selama ada sikap saling menghargai.⁷ Budiman dan Isnaeni mengangkat tahlilan dalam konteks pendidikan moderasi beragama di perkotaan, menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam mengelola perbedaan.⁸ Sementara Udin menganalisis perilaku sosial masyarakat dalam tradisi yasinan dan tahlilan melalui teori pertukaran sosial.⁹

Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak mengangkat aspek perilaku sosial, pelestarian budaya tahlilan, persepsi internal warga Muhammadiyah, dan fungsi moderasi. Namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengangkat konflik verbal karena penolakan tahlilan saat duka dengan pendekatan *Social Identity* dan *Contact Hypothesis*, khususnya dalam konteks masyarakat Madura yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas. Di sinilah letak perbedaan dan celah penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi terdahulu, yaitu mengintegrasikan dua teori psikologi sosial tersebut untuk memahami dinamika konflik dan merumuskan strategi resolusi yang berbasis pada interaksi sosial konkret.

Penelitian ini berkontribusi pada penguatan strategi moderasi beragama yang berbasis pada interaksi setara di lingkungan majemuk. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pendekatan baru dalam mengatasi konflik berbasis perbedaan praktik tradisi agama dengan mengandalkan narasi pengalaman langsung warga, bukan hanya argumentasi normatif. Temuan penelitian diharapkan dapat digunakan dalam

⁵ Usisa Rohmah, "INTERAKSI SOSIAL WARGA NU DAN MUHAMMADIYAH Studi Kasus di Desa Pundusari," *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)* 1, no. 2 (2016): 21–22, <https://doi.org/10.52447/gov.v1i2.263>.

⁶ Mohammad Jailani, "Preserving Cultural Identity Through *Tahlilan*: Strengthening Social Solidarity in Madura," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 18, no. 2 (29 April 2024): 383, <https://doi.org/10.14421/8rsyag46>.

⁷ Ana Riskasari, "Pengaruh Persepsi Tradisi Tahlilan di Kalangan Masyarakat Muhammadiyah terhadap Relasi Sosial di Desa Gulurejo Lendah Kulon Progo Yogyakarta," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 2, no. 2 (29 Mei 2019): 189–190, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-01>.

⁸ Septian Arief Budiman and Fil Isnaeni, "Tahlilan dan Pendidikan Moderasi Beragama: Dampaknya terhadap Toleransi Agama di Perkotaan", *Jurnal Keislaman*, vol. 8, no. 1 (2025), pp. 1–11.

⁹ Muhammad Diak Udin, "ANALISIS PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT DUSUN PLOSOREJO DESA KEMADUH KAB. NGANJUK DALAM TRADISI YASINAN DAN TAHLILAN (Study Deskriptif Melalui Pendekatan Teori Pertukaran Sosial)," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 2 (28 Mei 2016): 342, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i2.221>.

pengembangan program sosial atau kegiatan lintas kelompok keagamaan di tingkat lokal sebagai praktik nyata dari moderasi.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dinamika konflik verbal akibat perbedaan pelaksanaan tahlilan di masyarakat? dan (2) Bagaimana pendekatan interaksi sosial berbasis identitas dan kontak antar kelompok dapat meredam konflik tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sumber konflik, menganalisis persepsi sosial dari dua kelompok keagamaan yang berbeda, serta merumuskan strategi komunikasi sosial yang mendorong terciptanya harmoni dan toleransi antar warga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dinilai relevan untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual.¹¹ Studi kasus memberi ruang bagi penulis untuk memahami secara mendalam dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan konflik verbal akibat perbedaan praktik tahlilan antara warga Muhammadiyah dan NU di Kelurahan Kangenan Barat, Kabupaten Pamekasan.

Pendekatan studi kasus memungkinkan eksplorasi terhadap latar belakang, respon sosial, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi sikap masyarakat dalam menghadapi perbedaan keagamaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni dengan menyajikan data lapangan secara sistematis dan mengaitkannya dengan teori sosial yang relevan. Tujuannya adalah agar pemahaman terhadap konflik yang terjadi dapat dilihat dari berbagai sisi, termasuk persepsi individu dan relasi antar kelompok.¹²

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi.¹³ Observasi dilakukan langsung di lokasi tempat tinggal warga yang terlibat konflik untuk mengamati suasana sosial dan bentuk interaksi sehari-hari. Observasi berlangsung selama dua minggu pada akhir Mei hingga awal Juni 2025, dengan fokus pada pola interaksi sosial antar warga, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan ekspresi identitas kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga objektivitas, penulis menggunakan teknik observasi non-partisipan dengan mencatat secara detail perilaku dan interaksi yang diamati tanpa melibatkan diri secara langsung dalam aktivitas warga. Penulis juga melakukan triangulasi observasi dengan mengamati dari berbagai sudut pandang dan waktu yang berbeda untuk memastikan

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), p. 154.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 9-10.

¹² Evi Syafrida Nasution, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), pp. 16-17.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, pp. 73-4.

akurasi data. Mengingat sensitivitas isu konflik, penulis sangat berhati-hati untuk tidak menunjukkan keberpihakan dan menjaga kerahasiaan identitas informan.

Sementara itu, wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan dari tiga kelompok narasumber, yakni korban dari keluarga Muhammadiyah, saksi mata warga NU, serta tokoh NU dari daerah tersebut yang memberikan refleksi keagamaan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung atau pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti. Untuk keluarga Muhammadiyah, dipilih kepala keluarga yang langsung mengalami sindiran verbal. Untuk warga NU, dipilih saksi mata yang mengetahui kronologi kejadian secara detail. Sementara tokoh NU dipilih berdasarkan kapasitasnya sebagai figur yang dihormati dan memiliki pemahaman mendalam tentang relasi sosial antar kelompok keagamaan di wilayah tersebut. Penulis tidak melibatkan tokoh Muhammadiyah dalam penelitian ini karena fokus penelitian adalah pada respons dan persepsi warga NU sebagai kelompok mayoritas yang melakukan sindiran, serta mengeksplorasi solusi dari perspektif kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam kasus. Namun, penulis mengakui bahwa keterlibatan tokoh Muhammadiyah dapat memperkaya data dan menjadi rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

Dokumentasi meliputi catatan pribadi peneliti, transkrip wawancara, serta bukti tertulis yang relevan sebagai data pendukung. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Tahapan dalam model ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus. Ketiga tahap ini tidak bersifat linier, melainkan saling berkaitan dalam siklus yang berjalan selama proses penelitian berlangsung.¹⁴

PEMBAHASAN

Makna dan Akar Tradisi Tahlilan

Tahlilan berasal dari kata dasar tahlil, yang merupakan bentuk *masdar* dari *hallala-yuhallilu-tahlil*, yaitu mengucapkan kalimat *Lā Ilāha Illā Allāh*. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata ini berkembang menjadi “tahlilan” dengan penambahan akhiran “-an”, yang maknanya mengalami perluasan. Tahlilan tidak lagi hanya bermakna pelafalan kalimat tauhid, tetapi merujuk pada kegiatan keagamaan kolektif yang dilakukan pasca kematian seseorang, yang di dalamnya terdapat bacaan surat-surat pendek dari Al-Qur’an, kalimat-kalimat *thayyibah*, dan do’a untuk almarhum yang dilakukan secara berjamaah. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada hari ke-1 sampai ke-7 setelah kematian, lalu hari ke-40, ke-100, dan peringatan satu tahun (haul). Disebut

¹⁴ Ibid, 91–99.

“tahlilan” karena kalimat *Lā Ilāha Illā Allāh* memiliki porsi dominan dalam rangkaian bacaan tersebut.¹⁵

Dalam masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), tahlilan bukan sekadar ritual, tetapi juga telah menjadi bagian dari struktur sosial yang menguatkan rasa kebersamaan, empati, dan silaturahmi antar warga. Salah satu informan dalam penelitian ini, yakni seorang publik figur NU di Kelurahan Kangeran, menuturkan:

“Yang tujuh hari itu dulu masyarakat Arab ada perjamuan yang diisi mabuk-mabukan yang dikenal dengan zaman Jahiliyah. Oleh para wali seperti Sunan Kalijaga, adat itu nggak dihapus, tapi diisi dengan tahlilan. Makanya sampai sekarang jadi adat yang bernilai agama.”¹⁶

Pandangan informan tersebut mencerminkan pemahaman yang berkembang di kalangan NU bahwa tahlilan merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Pernyataan ini mengilustrasikan bagaimana tradisi pra-Islam yang dipandang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam kemudian “diislamkan” melalui penggantian konten dengan aktivitas yang bernilai ibadah. Dalam kerangka teori *Social Identity*, narasi semacam ini berfungsi sebagai legitimasi historis yang memperkuat identitas kelompok NU sebagai pewaris tradisi Walisongo dan penjaga kearifan lokal Islam Nusantara. Pandangan ini sejalan dengan Humaidi dkk., yang menyatakan bahwa tahlilan merupakan wujud akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi lokal masyarakat Jawa di Nusantara.¹⁷ Tradisi ini diwariskan oleh para Walisongo sebagai sarana dakwah yang menyesuaikan diri dengan budaya setempat, sebuah interpretasi historis yang banyak diterima dalam literatur Islam Nusantara.¹⁸ Lebih lanjut, Jailani dalam penelitiannya menegaskan bahwa tahlilan di Madura tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan solidaritas sosial yang mengikat komunitas dalam jaringan kebersamaan.¹⁹ Dengan kata lain, tahlilan diterima bukan hanya karena substansi bacaan keagamaannya, tetapi juga karena fungsinya dalam mempererat harmoni sosial dan menjaga kohesi komunitas.

Meskipun demikian, sebagian kelompok umat Islam memiliki pandangan berbeda terhadap praktik tahlilan. Muhammadiyah, misalnya, tidak mengadakan tahlilan karena tidak menemukan landasan syariat yang kuat untuk tradisi tersebut dalam praktik Rasulullah. Mereka meyakini bahwa doa untuk almarhum cukup dilakukan oleh anak-

¹⁵ Humaidi et al., “Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama, Budaya Khas Islam Nusantara dan Tradisi NU”, *An Nahdhoh: Jurnal Kajian Islam Aswaja*, vol. 1, no. 1 (2021), pp. 89–90.

¹⁶ Wawancara dengan Informan Publik Figur NU, Tanggal 4 Juni 2025.

¹⁷ Humaidi et al., “Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama, Budaya Khas Islam Nusantara dan Tradisi NU”, p. 94.

¹⁸ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah* (Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN dan LESBUMI PBNU, 2016), p. 390.

¹⁹ Mohammad Jailani, “Preserving Cultural Identity Through *Tahlilan*: Strengthening Social Solidarity in Madura,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 18, no. 2 (29 April 2024): 388-392, <https://doi.org/10.14421/8rsyag46>.

anak atau keluarga dekat tanpa harus mengumpulkan masyarakat secara luas. Dalam kasus ini, keluarga Muhammadiyah di Kelurahan Kangeran Barat tetap menjalin relasi sosial yang baik dengan warga sekitar, misalnya dengan menghadiri acara Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, atau peringatan 1 Muharram apabila mereka diundang.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak tahlilan bukanlah bentuk penolakan terhadap solidaritas sosial, melainkan ekspresi dari keyakinan keagamaan yang berbeda.

Oleh karena itu, tahlilan tidak hanya dipahami sebagai ekspresi keagamaan, tetapi juga sebagai simbol kohesi sosial yang telah mengakar dalam budaya masyarakat NU. Sementara itu, sikap sebagian warga Muhammadiyah yang tidak melaksanakan tahlilan mencerminkan perbedaan dalam memahami ajaran agama, bukan bentuk penolakan terhadap nilai sosial. Perbedaan inilah yang dalam konteks tertentu, seperti di Kelurahan Kangeran Barat, dapat memunculkan respons sosial yang berujung pada ketegangan.

Dinamika Konflik Verbal Akibat Perbedaan Pelaksanaan Tahlilan

Kelurahan Kangeran Barat merupakan wilayah yang didominasi oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) yang memegang erat tradisi keagamaan kolektif. Salah satu praktik yang dijunjung tinggi adalah pelaksanaan tahlilan sebagai bagian dari ritual sosial pasca kematian. Di tengah lingkungan semacam ini, keberadaan keluarga Muhammadiyah yang tidak melaksanakan tahlilan saat orang tuanya wafat menjadi perhatian warga sekitar. Meskipun keluarga tersebut tidak menentang norma masyarakat secara terbuka, perbedaan praktik itu menimbulkan respon sosial berupa sindiran dan ucapan yang bernada merendahkan.

Menurut keterangan salah satu informan yang merupakan saksi mata dan tetangga dekat dari kedua belah pihak, kejadian bermula saat beberapa orang dari luar kampung datang untuk melayat dan bertanya alamat rumah duka kepada salah satu tetangga yang dikenal sebagai warga NU. Alih-alih memberikan jawaban langsung, tetangga tersebut justru melontarkan sindiran:

“Iya, jadi waktu itu ada beberapa orang dari luar yang tanya alamat rumah duka, mau melayat ke almarhumah. Mereka nanya ke salah satu tetangga depan rumah Pak X yang NU juga, teman seumuran kita. Nah, bukannya langsung ngasih tahu alamat, dia malah nyeletuk dulu, ‘Lho, ke situ? Lah wong nggak ada tahlilan kok malah didatengin.’”²¹

Lebih lanjut, informan juga menceritakan bahwa ada cercaan lain yang dilontarkan oleh pemilik tanah pemakaman tempat almarhum dimakamkan. Ucapan tersebut tidak disampaikan secara langsung di hadapan keluarga Muhammadiyah, melainkan terdengar oleh warga lain:

²⁰ Wawancara dengan Informan Muhammadiyah (Kepala Keluarga), Kelurahan Kangeran Barat, tanggal 5 Juni 2025.

²¹ Wawancara dengan Informan NU (Saksi Mata), Kelurahan Kangeran Barat, tanggal 27 Mei 2025.

“Dia bilang begini, ‘Haduh bagaimana ini... tanah ini dipakai orang seperti ini?! Nggak ada tahlil, tapi terima orang yang ngelayat.’ Itu saya denger sendiri waktu di sekitaran makam.”²²

Bentuk konflik yang muncul dalam kasus ini bersifat simbolik dan verbal. Meskipun tidak menimbulkan pertikaian fisik, dampaknya cukup signifikan terhadap relasi sosial di lingkungan sekitar. Kepala keluarga Muhammadiyah yang menjadi sasaran sindiran tersebut mengaku tidak membalas atau memperpanjang masalah. Ia lebih memilih menjaga relasi sosial:

“Saya memang tidak mengadakan tahlilan karena prinsip Muhammadiyah. Tapi bukan berarti saya nggak peduli atau nggak menghargai orang lain. Buktinya kalau ada Maulid, Isra’ Mi’raj, saya tetap datang kalau diundang.”²³

Fenomena ini sejalan dengan temuan Yuliyatun Tajuddin yang menyatakan bahwa konflik sosial dalam organisasi keagamaan kerap kali bukan disebabkan oleh perbedaan aqidah atau doktrin, melainkan oleh ketegangan identitas kelompok dan resistensi terhadap perbedaan praktik keagamaan.²⁴ Sindiran yang muncul dalam kasus ini merupakan bentuk simbolik dari ketidakterimaan terhadap ekspresi keberagaman yang dianggap menyimpang dari norma dominan masyarakat setempat.

Untuk memahami dinamika konflik ini secara teoritis, penulis menggunakan pendekatan *Social Identity Theory* dari Henri Tajfel. Teori ini menjelaskan bahwa identitas sosial seseorang terbentuk melalui proses membedakan antara kelompok sendiri (*ingroup*) dan kelompok lain (*outgroup*). Dalam masyarakat, individu berusaha membangun citra diri positif melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, dan sikap terhadap kelompok lain kerap kali terbentuk dari cara ia memposisikan dirinya dalam jejaring sosial yang lebih luas. Tajfel menyatakan bahwa identitas sosial yang positif terbentuk dari “perbandingan yang menguntungkan antara kelompok sendiri dengan kelompok lain yang relevan,” dan proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman luar, tetapi juga oleh kebutuhan mendefinisikan posisi diri dalam masyarakat sejak awal kehidupan.²⁵

Sebagai gambaran sederhana, seseorang yang tergabung dalam komunitas tertentu cenderung merasa lebih “benar”, “ideal”, atau “bernilai” saat menjalankan kebiasaan kelompoknya, misalnya menghadiri pengajian rutin, mengenakan simbol keagamaan tertentu, atau dalam konteks ini, melaksanakan tahlilan. Ketika ada pihak lain yang tidak mengikuti praktik yang sama, ia bisa dipandang sebagai “bukan bagian dari kita”, atau

²² Wawancara dengan Informan NU (Saksi Mata), Kelurahan Kangeran Barat, tanggal 27 Mei 2025.

²³ Wawancara dengan Informan Muhammadiyah (Kepala Keluarga), Kelurahan Kangeran Barat, tanggal 5 Juni 2025.

²⁴ Tajuddin, “SUMBER DAYA MANUSIA DAN KONFLIK SOSIAL DALAM ORGANISASI KEAGAMAAN (Analisis Fenomena Konflik Komunitas NU dan Muhammadiyah)”, p. 93.

²⁵ Tajfel, “Social identity and intergroup behaviour”, p. 67.

bahkan dianggap menyimpang dari norma kolektif. Inilah awal dari konstruksi *ingroup-outgroup* yang dapat memicu ketegangan simbolik.

Dalam konteks ini, warga NU yang menganggap tahlilan sebagai norma sosial utama membentuk identitas kelompok yang kuat, di mana keberagaman diukur melalui partisipasi dalam tradisi tersebut. Ketika keluarga Muhammadiyah tidak mengadakan tahlilan, mereka tidak hanya diposisikan sebagai berbeda secara ibadah, tetapi juga sebagai pihak luar (*outgroup*) terhadap struktur nilai sosial yang dominan. Sindiran verbal yang muncul menjadi wujud tekanan simbolik untuk mempertahankan batas-batas identitas tersebut.

Namun, penting untuk ditekankan bahwa tahlilan adalah amalan yang bersifat Sunnah, yang berarti tidak wajib bagi setiap Muslim. Sebaliknya, yang bersifat wajib secara moral dan sosial dalam Islam justru adalah menghargai sesama, menjaga silaturahmi, serta menahan diri dari menyindir, mencerca, dan menggunjing.²⁶ Dengan demikian, perilaku menyudutkan terhadap keluarga Muhammadiyah dalam kasus ini bukanlah cerminan dari ajaran NU yang sejatinya menekankan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan Islam. Hal ini diperkuat oleh pernyataan tokoh NU sendiri dalam penelitian ini yang menegaskan pentingnya sikap *legowo* (lapang dada) dalam menerima perbedaan. Menurut Kementerian Agama RI, moderasi beragama dalam tradisi NU justru diwujudkan melalui prinsip *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *tawassuth* (jalan tengah) yang menghormati keberagaman praktik keagamaan.²⁷ Budiman dan Isnaeni menegaskan bahwa tradisi tahlilan seharusnya menjadi medium pendidikan moderasi beragama, bukan alat untuk menyudutkan kelompok yang tidak melaksanakannya.²⁸

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa tekanan *ingroup* yang kuat, di mana tahlilan berfungsi sebagai simbol kohesi sosial dan penanda identitas kelompok NU, telah mengubah perilaku individu dari sikap ideal *tasamuh* (toleransi) yang diajarkan dalam ajaran NU menjadi perilaku diskriminatif simbolik berupa sindiran dan cercaan. Fenomena ini mengungkap inkonsistensi antara ajaran normatif NU yang menekankan moderasi dan toleransi dengan praktik sosial sebagian warganya yang justru eksklusif dan diskriminatif. Dalam kerangka teori *Social Identity*, hal ini terjadi karena ketika identitas kelompok terancam atau dipersepsikan berbeda, mekanisme pertahanan psikologis kelompok dapat mengalahkan nilai-nilai normatif yang seharusnya dipegang. Dengan demikian, perilaku diskriminatif terhadap keluarga Muhammadiyah dalam kasus ini bukanlah representasi dari ajaran NU, melainkan manifestasi dari kegagalan individu dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi

²⁶ Wawancara dengan Informan Publik Figur NU, Tanggal 4 Juni 2025.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), p. 26.

²⁸ Septian Arief Budiman and Fil Isnaeni, "Tahlilan dan Pendidikan Moderasi Beragama: Dampaknya terhadap Toleransi Agama di Perkotaan", *Jurnal Keislaman*, vol. 8, no. 1 (2025), pp. 8-9, <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.345>.

yang diajarkan, yang dipicu oleh tekanan konformitas kelompok dan ketiadaan ruang dialog yang memadai untuk memahami perbedaan.

Strategi Reduksi Konflik Melalui Interaksi Sosial Antar Kelompok

Reduksi konflik verbal akibat perbedaan praktik keagamaan, seperti tidak dilaksanakannya tahlilan oleh warga Muhammadiyah, tidak cukup diatasi melalui imbauan normatif semata. Pendekatan strategis dan kontekstual diperlukan untuk membuka ruang dialog yang aman dan setara, yang memungkinkan terjadinya transformasi prasangka menjadi pengertian. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah *Contact Hypothesis* dari Gordon W. Allport.

Menurut Allport, kontak antar kelompok hanya akan efektif dalam mengurangi prasangka apabila memenuhi tujuh kondisi utama, yaitu: (1) status sosial yang setara antar kelompok yang terlibat, (2) tujuan bersama yang jelas dan disepakati, (3) kerja sama antar kelompok dalam mencapai tujuan tersebut, (4) adanya dukungan otoritas atau norma institusional, (5) kontak bersifat informal dan personal, (6) anggota kelompok lain dipandang sebagai representatif (bukan pengecualian), dan (7) terdapat potensi untuk berkembangnya hubungan persahabatan.²⁹

Terkait kondisi keempat (dukungan otoritas), peran tokoh agama dan pemimpin organisasi menjadi krusial. Dalam konteks NU dan Muhammadiyah, tokoh agama berperan sebagai penghubung, penyejuk, sekaligus penentu arah komunikasi lintas kelompok. Hal ini selaras dengan penjelasan Yuliyatun Tajuddin bahwa setiap organisasi keagamaan memerlukan tokoh yang aktif menyampaikan nilai-nilai persaudaraan Islam dalam dakwah, bimbingan, dan sosialisasi. Tokoh agama tidak hanya bertugas mengembangkan program keorganisasian, tetapi juga memantau dinamika sosial masyarakat, serta mengambil peran aktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik horizontal.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, semua informan mendukung pentingnya peran pemimpin atau publik figur. Kepala keluarga Muhammadiyah menyatakan bahwa dialog warga dari kelompok berbeda akan lebih bermakna jika melibatkan tokoh NU dan Muhammadiyah yang dihormati masyarakat.

“Kalau cuma masyarakat awam yang ngumpul, biasanya nggak ada hasilnya. Tapi kalau ada tokoh NU dan Muhammadiyah, mungkin suasananya bisa lebih adem dan terarah.”³¹

²⁹ Gordon Willard Allport, *The Nature of Prejudice* (Cambridge, Massachusetts: Addison-Wesley, 1954), pp. 280–281.

³⁰ Tajuddin, “SUMBER DAYA MANUSIA DAN KONFLIK SOSIAL DALAM ORGANISASI KEAGAMAAN (Analisis Fenomena Konflik Komunitas NU dan Muhammadiyah)”, pp. 97–98.

³¹ Wawancara dengan Informan Muhammadiyah (Kepala Keluarga), Kelurahan Kangeran Barat, tanggal 5 Juni 2025.

Dukungan senada juga disampaikan oleh publik figur NU yang menjadi informan. Ia justru menegaskan bahwa diskusi terbuka sebaiknya dilakukan oleh para pemimpin terlebih dahulu, bukan masyarakat umum:

“Kalau masyarakat disuruh berdialog langsung, malah bisa ribut. Lebih baik para pemimpin atau tokohnya dulu yang berkumpul, ngobrol santai. Masyarakat cukup diajari *legowo* menerima perbedaan.”³²

Dalam kerangka *Contact Hypothesis*, saran ini menunjukkan bahwa dukungan dari otoritas (poin 4) sudah tersedia secara kultural. Bahkan secara tidak langsung memenuhi syarat pertama (status setara), karena keterlibatan tokoh dari kedua organisasi besar akan menciptakan situasi yang seimbang dan tidak timpang.

Adapun syarat kelima (kontak informal dan personal) juga tercermin dari pernyataan informan NU saksi mata:

“Saya yakin yang bikin kita ribut itu bukan karena beda ajaran, tapi karena nggak ada komunikasi. Kalau bisa saling denger dan ngerti alasan masing-masing, insya Allah bisa adem.”³³

Sementara syarat kedua dan ketiga (tujuan bersama dan kerja sama) dapat dirancang melalui program kolaboratif lintas ormas Islam di tingkat lokal seperti pengajian bersama, kegiatan sosial, atau gotong royong warga. Tujuan bersama semacam ini bukan hanya menjaga kerukunan, tetapi juga membangun kepercayaan sosial. Lebih dari itu, jika kegiatan tersebut dilakukan secara berkala dan dalam suasana persahabatan, maka syarat keenam dan ketujuh pun terpenuhi, yakni munculnya persepsi bahwa anggota kelompok lain adalah representatif dan bukan pengecualian, serta tumbuhnya kemungkinan hubungan personal lintas batas organisasi.

Maksudnya, dalam konteks relasi sosial antar kelompok keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, penting bagi masyarakat untuk tidak melihat perbedaan praktik ibadah sebagai penyimpangan yang hanya dilakukan oleh “oknum” tertentu. Misalnya, jika seorang warga Muhammadiyah tidak mengadakan tahlilan, maka ia tidak boleh langsung dicap sebagai orang yang tidak menghargai tradisi. Begitu pula, jika warga NU rajin mengadakan tahlilan, bukan berarti mereka memaksakan kepercayaannya kepada semua orang.

Ketika warga NU dan Muhammadiyah sering berinteraksi secara positif, misalnya bekerja sama dalam kegiatan bersih desa atau saling mengundang di acara syukuran, maka persepsi publik akan mulai bergeser. Warga akan menganggap bahwa “oh, ternyata orang NU yang santun seperti ini banyak”, atau “ternyata tetangga Muhammadiyah saya juga orang yang terbuka dan baik, bukan seperti yang saya bayangkan selama ini”. Inilah yang dimaksud sebagai representatif, yaitu melihat

³² Wawancara dengan Informan NU (Publik Figur), tanggal 4 Juni 2025.

³³ Wawancara dengan Informan NU (Saksi Mata), Kelurahan Kangeran Barat, tanggal 27 Mei 2025.

anggota kelompok lain sebagai perwakilan umum dari komunitasnya, bukan pengecualian atau anomali (ketidaknormalan atau penyimpangan dari kebiasaan).

Dengan begitu, relasi antar kelompok keagamaan tidak lagi dibangun berdasarkan asumsi dan stereotip, tetapi atas dasar pengalaman langsung dan hubungan personal yang nyata. Ketika hubungan ini terbangun, maka prasangka akan melemah, dan ruang untuk saling menghargai pun terbuka lebih luas. Dengan mengacu pada keseluruhan kondisi di atas dan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya khas masyarakat Pamekasan, Madura, maka strategi yang direkomendasikan adalah:

1. Dialog Lintas Tokoh Agama Berbasis Kearifan Lokal Madura

Dialog santai antar tokoh NU dan Muhammadiyah tingkat lokal (Kiai, guru ngaji, ustadz/ustadzah, serta tokoh masyarakat yang dihormati seperti *blater*) dilakukan secara berkala untuk membangun kesepahaman bersama tentang pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan praktik keagamaan. Dialog sebaiknya dilakukan dalam suasana informal seperti pertemuan kopi darat (Kopdar), silaturahmi pasca shalat Jum'at, atau bahkan format *podcast* bersama yang melibatkan tokoh dari kedua organisasi.

Format *podcast* sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana banyak tokoh agama nasional telah menggunakan media ini untuk menyebarkan dakwah dan dialog. *Podcast* lokal dapat diadaptasi untuk memberikan ruang diskusi yang santun dan edukatif, sekaligus mendokumentasikan kesepahaman yang dicapai sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. *Podcast* ini dapat melibatkan tidak hanya tokoh internal NU dan Muhammadiyah, tetapi juga organisasi eksternal kampus yang berlatar Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang dapat memberikan perspektif generasi muda dalam membangun moderasi beragama.

Lebih dari itu, dalam tradisi Madura terdapat tokoh-tokoh panutan seperti Kiai atau Blater (tokoh yang dihormati karena keberanian dan kepemimpinannya) yang dapat menjadi mediator efektif. Keterlibatan mereka dalam dialog akan memberikan legitimasi kuat dan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat diterima oleh masyarakat luas. Momentum pasca shalat Jum'at dapat dimanfaatkan sebagai waktu yang strategis untuk dialog informal antar tokoh, di mana suasana lebih rileks dan terbuka untuk diskusi keagamaan. Format ini lebih efektif dibandingkan debat formal yang justru dapat mempertajam perbedaan.

2. Program Kolaboratif Berbasis Tradisi Lokal dan Aksi Sosial

Program lintas kelompok berbasis aksi sosial bersama yang mengadaptasi tradisi lokal Madura, seperti kerja bakti serentak yang biasanya dilaksanakan pada hari Minggu dan diinstruksikan melalui pengeras suara di Masjid oleh RT/RW sehingga dapat menghadirkan warga desa/kelurahan dalam skala yang lebih besar. Kerja bakti ini menjadi momentum strategis untuk membangun solidaritas lintas kelompok keagamaan

karena melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga tanpa membedakan afiliasi organisasi.

Selain itu, dapat dimanfaatkan tradisi *Slametan* (selamatan bersama) yang merupakan praktik lintas organisasi dan dapat menjadi medium penguatan solidaritas sosial. Program-program ini dirancang dengan tujuan bersama yang jelas, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, atau membantu warga yang membutuhkan dan memerlukan kerja sama aktif dari semua pihak, sehingga menciptakan pengalaman positif yang dapat mengurangi prasangka.

Khusus di Pamekasan, dapat dimanfaatkan forum komunitas yang sudah ada seperti *Kopdar Muslim Biker Indonesia Chapter Madura* yang memiliki program Kajian Rutin dan Dakwah Sosial. Program kajian rutin komunitas ini dapat menjadi wadah dialog informal yang menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan beragam, sementara program dakwah sosial mereka dapat menjadi media kerja sama konkret antar kelompok keagamaan dalam aktivitas kemanusiaan. Dengan melibatkan tradisi lokal dan komunitas yang sudah familiar dan diterima kedua pihak, program ini akan lebih mudah diterima dan berkelanjutan.

3. Pendidikan Moderasi Beragama Melalui Forum Berbasis Komunitas

Pendidikan masyarakat berbasis nilai moderasi dilakukan melalui berbagai forum yang sudah ada dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Madura. Salah satu forum yang sangat strategis adalah pengajian mingguan yang dilaksanakan secara rutin di berbagai desa/kelurahan, seperti '*malem Senin-an*' (pengajian bapak-bapak) dan '*malem Kamis-an*' (pengajian ibu-ibu) yang biasanya dilaksanakan *ba'da* Maghrib dan bergilir dari rumah ke rumah. Forum ini juga dikenal dengan sebutan "*koloman*" di beberapa daerah, yang pada intinya berisi bacaan tahlil, doa, ramah tamah, dan tausiyah singkat dari tokoh agama yang juga mengikuti kegiatan tersebut.

Pengajian mingguan semacam ini sangat ideal sebagai wadah pendidikan moderasi karena mampu mengumpulkan beberapa kepala keluarga atau yang mewakili dalam suasana yang informal dan akrab. Meskipun antara satu desa dengan desa lain berbeda waktu pelaksanaan dan penyebutan kegiatannya, namun substansi kegiatan ini relatif sama dan sudah menjadi tradisi yang sangat mengakar. Forum ini jarang ditemukan di kota dan lebih kental di wilayah pedesaan, sehingga sangat relevan dengan konteks Kelurahan Kangenan Barat. Dalam forum pengajian mingguan ini, tokoh agama yang memberikan tausiyah dapat menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama, seperti pentingnya menghargai perbedaan praktik keagamaan, menjaga silaturahmi antar kelompok, dan mengutamakan ukhuwah Islamiyah di atas perbedaan *furu'iyah* (cabang/detail).

Selain pengajian mingguan, pendidikan moderasi juga dapat diselenggarakan melalui *Majlis Ta'lim* di langgar-langgar atau masjid, Dasawisma (kelompok ibu-ibu tingkat RT), dan Karang Taruna untuk generasi muda. Untuk memberikan legitimasi organisasional yang kuat, pendidikan moderasi ini dapat melibatkan secara resmi PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) dan PD Muhammadiyah (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Pamekasan sebagai penyelenggara atau fasilitator. Keterlibatan kedua

organisasi induk ini akan memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa moderasi beragama adalah komitmen bersama di tingkat struktural, bukan hanya inisiatif personal. Selain itu, dapat melibatkan organisasi eksternal kampus seperti HMI, PMII, dan IMM yang memiliki basis massa mahasiswa dan dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih muda dan terdidik.

Pendidikan ini tidak hanya bersifat kognitif (pengetahuan tentang moderasi beragama), tetapi juga afektif (pengembangan sikap menghargai perbedaan) dan perilaku (praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari). Materi yang disampaikan sebaiknya tidak hanya berfokus pada perbedaan, tetapi lebih menekankan kesamaan nilai-nilai fundamental Islam yang dipegang oleh kedua organisasi, seperti pentingnya ukhawah Islamiyah, silaturahmi, dan kemaslahatan umum. Dalam konteks Madura yang memiliki kultur "*Bhâpa' Bhâbu', Ghuru, Rato*" (hormat kepada Bapak, Ibu, Guru, dan Pemimpin), pendidikan moderasi harus melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki otoritas moral di masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Ketiga strategi ini dirancang secara spesifik dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya Madura yang kental dengan nilai-nilai keagamaan, menghormati tokoh/pemimpin, dan mengutamakan musyawarah serta kekeluargaan. Dengan memanfaatkan locus dialog, tradisi lokal, komunitas yang sudah ada, serta melibatkan organisasi formal seperti PCNU dan PD Muhammadiyah Pamekasan, implementasi strategi ini diharapkan lebih kontekstual, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini akan membuka peluang penguatan toleransi berbasis pengalaman nyata yang lebih besar, sekaligus mencegah konflik serupa terulang di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik verbal yang terjadi di Kelurahan Kangeran Barat akibat perbedaan pelaksanaan tradisi tahlilan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan teologis antara NU dan Muhammadiyah, tetapi lebih pada kegagalan membangun komunikasi lintas kelompok yang sehat dan setara. Ketegangan muncul bukan karena tahlilan itu sendiri, melainkan dari sikap sebagian warga yang menyikapi perbedaan secara emosional dan eksklusif. Tradisi yang sifatnya sunnah justru dijadikan standar mutlak dalam penilaian sosial, sehingga mengaburkan nilai-nilai keislaman yang lebih esensial seperti saling menghargai, menjaga silaturahmi, dan berbaik sangka. Melalui teori Social Identity, penulis menemukan bahwa konflik ini berakar pada proses penguatan identitas kelompok yang memposisikan pihak lain sebagai outgroup, yang kemudian menimbulkan sikap diskriminatif secara simbolik.

Untuk itu, strategi penyelesaian konflik berbasis Contact Hypothesis menjadi alternatif yang rasional dan kontekstual. Melalui syarat-syarat seperti kesetaraan status, dukungan tokoh otoritatif, kontak informal, dan kerja sama lintas kelompok, maka perbedaan dapat dijumpai melalui pengalaman sosial yang positif. Penelitian ini menekankan pentingnya peran tokoh agama atau publik figur dari NU dan Muhammadiyah sebagai inisiator dialog dan penengah konflik. Selain itu, keterlibatan

masyarakat dalam kegiatan sosial bersama dapat membentuk hubungan personal dan memperbaiki persepsi satu sama lain. Strategi tiga lapis yang direkomendasikan: dialog tokoh berbasis kearifan lokal Madura, program kolaboratif yang memanfaatkan tradisi lokal, dan pendidikan moderasi melalui forum berbasis komunitas, menawarkan pendekatan komprehensif dan kontekstual yang mengintegrasikan dimensi kepemimpinan, aksi sosial, dan pembentukan karakter dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya khas masyarakat Madura. Dengan langkah ini, moderasi beragama tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi dapat tumbuh dari pengalaman kolektif yang membumi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, Gordon Willard, *The Nature of Prejudice*, Cambridge, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1954.
- Budiman, Septian Arief dan Fil Isnaeni, "Tahlilan dan Pendidikan Moderasi Beragama: Dampaknya terhadap Toleransi Agama di Perkotaan", *Jurnal Keislaman*, vol. 8, no. 1, 2025, pp. 1-11, <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.345>.
- Evi Syafrida Nasution, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Humaidi et al., "Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama, Budaya Khas Islam Nusantara dan Tradisi NU", *An Nahdhoh: Jurnal Kajian Islam Aswaja*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 89-99, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/10740>.
- Jailani, Mohammad, "Preserving Cultural Identity Through Tahlilan: Strengthening Social Solidarity in Madura", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 18, no. 2, 2024, pp. 383-404, <https://doi.org/10.14421/8rsyag46>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Pettigrew, Thomas F. and Linda R. Tropp, "A meta-analytic test of intergroup contact theory.", *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 90, no. 5, 2006, pp. 751-783, <https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751>.
- Riskasari, Ana, "Pengaruh Persepsi Tradisi Tahlilan di Kalangan Masyarakat Muhammadiyah terhadap Relasi Sosial di Desa Gulurejo Lendah Kulon Progo Yogyakarta", *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 2, no. 2, 2019, pp. 189-205, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-01>.
- Rohmah, Usisa, "INTERAKSI SOSIAL WARGA NU DAN MUHAMMADIYAH Studi Kasus di Desa Punduhsari", *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, vol. 1, no. 2, 2016, pp. 21-45, <https://doi.org/10.52447/gov.v1i2.263>.
- Rusdiyah, Evi Fatimatur, Halimatus Sa'diyah, and Masykurotin Azizah, "The millennial Kiais: contemporary Indonesian dakwah activism through social media", *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, vol. 15, no. 1, 2021, pp. 75-97, <https://doi.org/10.21274/epis.2020.15.1.75-97>.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhail, Ahmad Kusjairi et al., "Azyurmardi Azra dan Moderasi Beragama di Indonesia", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 19, no. 2, 2025, pp. 737-754, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4179>.
- Sunyoto, Agus, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah, Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN dan LESBUMI PBNU*, 2016.
- Tajfel, Henri, "Social identity and intergroup behaviour", *Social Science Information*, vol. 13, no. 2, 1974, pp. 65-93, <https://doi.org/10.1177/053901847401300204>.

- Tajuddin, Yuliyatun, "SUMBER DAYA MANUSIA DAN KONFLIK SOSIAL DALAM ORGANISASI KEAGAMAAN (Analisis Fenomena Konflik Komunitas NU dan Muhammadiyah)", *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, vol. 1, no. 1, 2016, pp. 75-100, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tadbir/article/view/2384>.
- Udin, Muhammad Diak, "ANALISIS PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT DUSUN PLOSOREJO DESA KEMADUH KAB. NGANJUK DALAM TRADISI YASINAN DAN TAHLILAN (Study Deskriptif Melalui Pendekatan Teori Pertukaran Sosial)", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 26, no. 2, 2016, pp. 342-361, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i2.221>.